PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
(Studi Kasus Pada BPKAD - Pemerintah Kota Cimahi)

ILHAM KUSUMA NUGRAHA – 21113164
Email: ilhamkusumanugraha@gmail.com

Pembimbing:
Dr. Adeh Ratna Komala, SE., M.Si

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Bandung, 2017

ABSTRACT

Some problems found in the government's financial statements caused by the limited of human resources with the background of accounting education and internal controls that have not been significantly effective yet, still appear to be loosely supervised. This study aims to find out whether The Competence of Human Resources and The Application of Government Internal Control System significant effect to The Quality of Local Government Financial Statement. This research uses questionnaire as a research tool that distributed to 26 (respondent) Financial and Asset Management Agency (BPKAD) - Cimahi City Government's employees with saturated sample.Testing is done using validity and reliability test. Data processed and analyzed by using descriptive statistic with technique analysis Structural Equation Modelling (SEM) by using Partial Least Square (PLS). Based on the results of the research concluded that The Competence of Human Resources has significant influence to The Quality of Local Government Financial Statement and The Application of Government Internal Control System has significant influence to The Quality of Local Government Financial Statement.

Keywords: The Competence of Human Resources, The Application of Government Internal Control System, The Quality of Local Government Financial Statement

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik (Kadek Desiana Wati, 2014). Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Safrida Yuliani, 2012). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip (Dewi Andini, 2015). Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas (Ardeno Kurniawan, 2013). Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Kadek Desiana Wati, 2014).

Informasi dalam laporan keuangan banyak digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna mengambil suatu keputusan (Kadek Desiana Wati, 2014). Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka mempertanggungjawabkan keuangan negara (Ni Made Rika Krisna Dewi, 2014).

Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporan keuangannya. Dikatakan lebih lanjut, penilaian itu didasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Harry Azhar Aziz, 2014). Hal senada, belum optimalnya capaian kualitas laporan keuangan di pemerintahan daerah dimana pemerintahan kabupaten/kota yang mencapai Opini WTP dibawah 50% yang seharusnya 60% (Remonezar Monet, 2015).

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten (Kadek Desiana Wati, 2014). Kompetensi adalah dimensi perilaku yang ada di belakang kinerja yang menunjukkan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik (M. Ma'ruf Abdullah, 2014:51). Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien, efektif dan ekonomis (Kadek Desiana Wati, 2014). Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat (Kadek Desiana Wati, 2014).

Akan tetapi, secara hitungan kasar, kebutuhan tenaga akuntansi di pemerintah daerah seluruh Indonesia adalah sekitar 25.000 orang dan kenyataannya tenaga kerja yang berlatar belakang akuntansi keuangan daerah masih sangat minim (Djadja Sukirman, 2013). Kemudian, masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini dikarenakan masih belum memadainya kualitas sumber daya manusia (Harry Azhar Aziz, 2014).

Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka mempertanggungjawabkan keuangan negara (Ni Made Rika Krisna Dewi, 2014). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik pula (Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, 2014). Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016:251). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang (Jonny M. Situmorang, 2016).

Adapun fenomena yang terjadi, pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2016 terhadap laporan keuangan pemerintah 2015, tercerminkan 15.568 temuan memuat 10.198 permasalahan. Sebanyak 49 persen permasalahannya adalah kelemahan sistem pengendalian intern dan 51 persen permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Harry Azhar Azis, 2016). Opini WDP diberikan karena BPK masih menemukan beberapa salah saji material dalam laporan keuangan pemerintah 2015 berupa ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Humbul Kristiawan, 2016).

Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, 2014).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pemerintah daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporan keuangannya. Penilaian itu didasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini dikarenakan masih belum memadainya kualitas sumber daya manusia.

3. Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2016 terdapat permasalahan sebesar 49 persen berupa kelemahan sistem pengendalian intern dan 51 persen permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapat kebenaran mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menurut Sugiyono (2013:305) merupakan dampak dari tercapainya maksud dan tujuan penelitian. Apabila penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah terjawab akurat (Sugiyono, 2013:305).

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak instansi terkait dan pemecahan masalah mengenai adanya Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Sebagai sarana pengaplikasian teori sehingga berguna bagi pihak akademis lain yang memerlukan.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

M. Ma'ruf Abdullah (2014:51) menyampaikan kompetensi adalah dimensi perilaku yang ada di belakang kinerja kompeten yang menunjukkan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik (M. Ma'ruf Abdullah, 2014:51).

Sedangkan, Eddy Soeryanto Soegoto (2014:306) menjelaskan sumber daya manusia adalah individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi (Eddy Soeryanto Soegoto, 2014:306).

Sementara itu, Mangkunegara (2011:40) menyatakan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Mangkunegara, 2011:40).

2.1.2.1 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Muh. Akob Kadir (2016:18) menjelaskan kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki:

a. Keterampilan (*skill*)
b. Pengetahuan (*knowledge*)
c. Kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan

2.1.2 Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Azhar Susanto (2009:18) menjelaskan sistem adalah kumpulan/*group* dari sub-sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu (Azhar Susanto, 2009:18).

Sedangkan, Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2009:221) menerangkan pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini: (1) Keandalan pelaporan keuangan. (2) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi. (3) Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. (4) Efektivitas dan efisiensi operasi (Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu, 2009:221).

Sementara itu, Mahmudi (2016:251) menjelaskan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi 2016:251).

2.1.2.1 Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemeritah (SPIP)

Mahmudi (2016:254) menguraikan karakteristik sistem pengendalian pemerintah sebagai berikut:

a. Penegakan integritas dan nilai etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Kepemimpinan yang kondusif
d. Pembentukan struktur organisasi
e. Pendelegasian tugas dan wewenang
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM
g. Perwujudan peran pengawas internal
h. Pengendalian umum
i. Pengendalian aplikasi
j. Informasi dan komunikasi
k. Pemantauan (*monitoring*)

2.1.3 Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Mahmudi (2016:143) menyebutkan laporan keuangan merupakan *output* dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan (Mahmudi, 2016:143).

Sedangkan, Erlina dan Rasdianto (2013:21) mendefinisikan laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Erlina dan Rasdianto, 2013:21).

2.1.3.1 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Abdul Hafiz Tanjung (2014:14) menjelaskan yang memenuhi karakteristik dari kualitas laporan keuangan yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
c. Tepat waktu
d. Lengkap
e. Penyajian jujur
f. Dapat diverifikasi (*verifiability*)
g. Netralitas

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pegaruh Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Mardiasmo (2002:146) mengatakan bahwa:

"Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan."

Abdul Hafiz Tanjung (2014:6) menjelaskan bahwa:

"Salah satu hal mendasar LKPD tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI dikarenakan langkanya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah."

Pernyataan di atas didukung oleh peneliti Iftitah Dian Humairoh (2013) dan Ida Ayu Enny Kiranyanti, dkk (2016), dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2.2 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016:181) menjelaskan bahwa:

"Sistem pengendalian intern merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya salah satunya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan."

Mahmudi (2016:251) menyatakan bahwa:

"Instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadi buruk salah satu penyebab utamanya berasal dari lemahnya sistem pengendalian internal."

Pernyataan di atas didukung oleh peneliti Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti (2014) dan Jonny M. Situmorang (2016), dalam hasil penelitiannya mengemukakan Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2013:99) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, kajian pustaka dan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

H_2: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

III. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Umi Narimawati (2010:29) menyebutkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2011:147) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan dengan teori-terori yang telah dipelajari.

Selanjutnya, Umi Narimawati (2010:290) menjelaskan metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan. Metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural/*Structural Equation Model* (SEM) berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya.

Sugiyono (2012:13) menjelaskan bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran untuk mendapatkan suatu data objek, dimana dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

3.2 Oprasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. *Independent Variable* (X)
   Sugiyono (2012:39) menyatakan variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
   Variabel independen (X_1) dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sedangkan variabel independen (X_2) dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. *Dependent Variable* (Y)
   Sugiyono (2011:39) menyatakan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
   Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sugiyono (2012:137) menyatakan bahwa sumber data penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer yaitu dengan cara membagikan kuesioner untuk para pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terdapat di Pemerintah Kota Cimahi - Provinsi Jawa Barat. Sedangkan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, literatur-literatur seperti dokumen instansi/buku/internet.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan
   Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari perusahaan, landasan teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara dokumentasi. Studi dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data yang bersumber literatur-literatur bahan kuliah dan hasil yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan cara seperti:

1. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan.
2. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang diteliti.
3. Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2010:80) menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah objek yang memiliki karakteristik tertentu yang telah ditetapkan untuk diteliti dan dipelajari. Populasi yang digunakan adalah 26 pegawai (responden) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terdapat di Pemerintah Kota Cimahi - Provinsi Jawa Barat.

3.4.2 Sampel

Sugiyono (2012:126) mendefinisikan sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan pemaparan teori diatas dan jumlah populasi pegawai (responden) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terdapat di Pemerintah Kota Cimahi - Provinsi Jawa Barat hanya berjumlah 26 pegawai (responden), maka peneliti memilih untuk menggunakan sampel jenuh dengan menetapkan tingkat kepercayaan/keyakinan 95% dan nilai *error* 5%.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemerintah Kota Cimahi - Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2017 sampai dengan Juli 2017.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Jogiyanto (2007:123) menjelaskan validitas menunjukkan bahwa suatu pengujian benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur

Kriteria yang digunakan untuk menentukan valid tidaknya alat tes adalah 0,30 (Azwar, 2000) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila nilai indeks validitas suatu alat test 0,30 (r kritis) maka alat tes tersebut dinyatakan valid.
2. Apabila nilai indeks validitas suatu alat test < 0,30 (r kritis) maka alat tes tersebut dinyatakan tidak valid (gugur).

3.5.2 Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya terhadap butir-butir pertanyaan yang dinyatakan valid uji keandalannya, bersifat *ajeg*, stabil dan konsisten. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran artinya pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama akan memberikan hasil yang sama dengan beberapa kali pengukuran selama aspek yang diukur tidak berubah (Kuncoro, 2003:154).

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Data Deskriptif

Sugiyono (2009:21) menjelaskan analisis deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data untuk metode penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Setiap indikator yang dinilai responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
2. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
3. Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.

$$\boldsymbol{Skor\ Total = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal}}$$

(Sumber: Umi Narimawati, 2010:45)

3.6.2 Analisis Data Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software SmartPLS* 2.0.

Peneliti menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

Adapun langkah-langkah metode *Partial Least Square* yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Merancang Model Pengukuran**
   Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*. Untuk variabel laten Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari 2 variabel *manifest*. Kemudian, variabel laten Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari 6 variabel manifest dan variabel laten Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari 6 variabel *manifest*.
2. **Merancang Model Struktural**
   Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari dua variabel laten eksogen (Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)) dan satu variabel laten endogen (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)).
3. **Membangun Diagram Jalur**
   Hubungan antar variabel pada diagram alur dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama. Diagram alur menggambarkan hubungan antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukkan hubungan kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainnya. Konstruk eksogen dikenal dengan *independent variabel* yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain.
4. **Menjabarkan Diagram Alur ke dalam Persamaan Matematis**
   Berdasarkan konsep model penelitian pada tahap dua di atas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang konversi terdiri atas:
   1. Persamaan *inner model*, menyatakan hubungan kausalitas untuk menguji hipotesis.

2. Persamaan *outer mode* (model pengukuran), menyatakan hubungan kausalitas antara indikator dengan variabel penelitian (*latent*).

Persamaan model pengukuran:

Exogenous Constructs	*Endogenous Construts*
$X = \Lambda x \xi + \delta$	$Y = \Lambda y \eta + \varepsilon$

Sumber : Imam Ghozali (2006)

Persamaan matematis dalam penelitian ini yang telah dijelaskan pada diagram jalur adalah:

1) Persamaan model struktural (*inner model*)

$$\eta = \beta\xi_1 + \gamma\xi_2 + \delta$$

2) Persamaan model pengukuran (*outer model*)
   a) Pengukuran Variabel Eksogen
      X1.1 = λ1 ξ 1 + δ1
      X1.2 = λ2 ξ 1 + δ2
      X1.3 = λ3 ξ 1 + δ3
      X2.1 = λ4ξ 2 + δ4
      X2.2 = λ5ξ 2 + δ5
      X2.3 = λ6ξ 2 + δ6
      X2.4 = λ7ξ 2 + δ7
   b) Pengukuran variable Endogen
      Y1 = λ8η + ε1
      Y_2= λ9η + ε2

5. Estimasi

Estimasi menurut Imam Ghozali (2006:85), pada tahapan ini adalah: Nilai γ, β dan λ yang terdapat pada langkah keempat diestimasi menggunakan program *Smart PLS*. Dasar yang digunakan untuk dalam etimasi adalah *resampling* dengan *Bootstrapping* yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Tahap pertama dalam estimasi menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan parameter lokasi (konstanta).

6. Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kecocokan model pada *Structural Equation Modeling* melalui pendekatan *partial least square* terdiri dari dua jenis, yaitu uji kecocokan model pengukuran dan uji kecocokan model struktural.

1. Uji Kecocokan Model Pengukuran *(Outer Model)*
   Uji kecocokan model pengukuran (*fit test of measurement model*) adalah uji kecocokan pada *outer model* dengan melihat validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*).
   a. Validitas konvergen (*convergent validity*) adalah nilai faktor *loading* pada laten dengan indikator-indikatornya. Faktor *loading* adalah koefisien jalur yang menghubungkan antara variabel laten dengan indikatornya. Validitas konvergen (*convergent validity*) dievaluasi dalam tiga tahap yaitu:
      1. Indikator validitas: dilihat dari nilai faktor *loading* dan t-*statistic* sebagai berikut:
         a. Jika nilai faktor *loading* antara 0,5-0,6 maka dikatakan cukup, sedangkan jika nilai faktor *loading* ≥ 0,7 maka dikatakan tinggi (Imam Ghozali, 2006).
         b. Nilai t-*statistic* ≥ 1,96 menunjukkan bahwa indikator tersebut sahih (Uce Indahyanti, 2013).
      2. Reliabilitas konstruk: dilihat dari nilai *output Composite Reliability* (CR). Kriteria dikatakan reliabel adalah nilai CR lebih besar dari 0,7 (Uce Indahyanti, 2013).
      3. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE): nilai AVE yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,5 (Uce Indahyanti, 2013).

4. Validitas diskriminan (*discriminant validity*) dilakukan dalam dua tahap yaitu dengan cara melihat nilai *cross loading factor* dan membandingkan akar AVE dengan korelasi antar konstruk/variabel laten. *Cross loading factor* untuk mengetahui apakah variabel laten memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan korelasi indikator dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan korelasi antara indikator dengan variabel laten yang lain. Jika korelasi indikator dengan variabel latennya memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap variabel laten lain, maka dikatakan variabel laten tersebut memiliki validitias diskriminan yang tinggi (Uce Indahyanti, 2013). Nilai AVE direkomendasikan ≥ 0,5.

2. Uji Kecocokan Model Struktural *(Inner Model)*

Uji kecocokan model struktural (*fit test of structural model*) adalah uji kecocokan pada *inner mode* berkaitan dengan pengujian hubungan antar variabel yang sebelumnya dihipotesiskan (Uce Indahyanti, 2013). Evaluasi menghasilkan hasil yang baik apabila:

1. Koefisien korelasi menunjukkan hubungan (korelasi) antara dua buah variabel, dimana nilai koefisien korelasi menunjukkan arah dan kuat hubungan antara dua variabel. Karena data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal atau peringkat, maka koefisien korelasi yang dipakai adalah koefisien korelasi *spearman* atau koefisien korelasi *range*. Rumus dari koefisien korelasi *spearman* atau koefisien korelasi *range* adalah sebagai berikut:

$$r = 1 - \frac{6.\sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

Sumber : Agus Purwoto (2007:52)

Keterangan:
r = koefisien korelasi
D = perbedaan skor antara dua variabel
N = jumlah subyek dalam variabel

Bentuk dan besarnya koefisien korelasi (r) memiliki nilai -1 sampai dengan +1 yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Jika r ≤ 0, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat merupakan hubungan negatif. Artinya, jika variabel bebas naik, maka variabel terikat turun. Sebaliknya, jika variabel bebas turun, maka variabel terikat naik.
b. Jika r > 0, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat merupakan hubungan positif. Artinya, jika variabel bebas naik, maka variabel terikat naik. Sebaliknya, jika variabel bebas turun, maka variabel terikat turun.
c. Jika r = 0, berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungan. Artinya, jika salah satu variabel berubah maka tidak mempengaruhi variabel lainnya.
d. Jika r = -1 atau 1, berarti antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan negatif/positif yang kuat sempurna.

1. Koefisien hubungan antar variabel tersebut signifikan secara statistik yaitu dengan nilai t-*statistic* ≥ 1,645. Taraf nyata atau taraf keberartian (α) dalam penelitian ini adalah 0,05, dimana di dalam tabel distribusi normal nilainya adalah 1,645. Apabila nilai t-*statistic* ≥ 1,645 berarti ada suatu hubungan atau pengaruh antar variabel dan menunjukkan bahwa model yang dihasilkan semakin baik (Uce Indahyanti, 2013).
2. Nilai koefisien determinasi (R2 atau R-*square*) mendekati nilai 1. Nilai R2 untuk konstruk dependen menunjukkan besarnya pengaruh/ketepatan konstruk independen dalam mempengaruhi konstruk dependen. Nilai R2 menjelaskan seberapa besar variabel eksogen yang dihipotesiskan dalam persamaan mampu

menerangkan variabel endogen. Nilai R2 ini dalam PLS disebut juga Q-*square predictive relevance*. Besarnya R2 tidak pernah negatif dan paling besar sama dengan satu (0 ≤ R2 ≤ 1). Semakin besar nilai R2, berarti semakin baik model yang dihasilkan (Uce Indahyanti, 2013).

7. Uji kecocokan seluruh model/model gabungan

Uji kecocokan seluruh model/model gabungan (*fit test of combination model*) adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model secara keseluruhan, menggunakan nilai *Goodness of Fit* (GoF). GoF merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural yang diperoleh dari akar nilai rata-rata *communality* dikalikan dengan akar nilai rata-rata R-*square* (Uce Indahyanti, 2013). Nilai GoF terbentang antara 0-1 dengan interpretasi 0,1 (GoF kecil); 0,25 (GoF moderat); dan 0,36 (GoF substansial) (Uce Indahyanti:2013).

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_a) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai X_1 dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai X_2 terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai variabel dependen Y, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis secara Secara Parsial (Uji Statistik t)

Untuk menguji koefisien secara parsial dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *statistic* t dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis secara parsial antar variabel bebas Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:
   - Ho:$\beta 1 = 0$ Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
   - Hả:$\beta 1 \neq 0$ Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

b. Menentukan hipotesis secara parsial antar variabel bebas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:
   - Ho:$\beta 2 = 0$ Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
   - Hả:$\beta 2 \neq 0$ Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Responden

Dari 26 responden yang telah mengisi kuesioner maka dapat diuraikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia dan berdasarkan sub kerja/bagian/divisi.

Diketahui bahwa mayoritas responden yang diteliti sebanyak 14 pegawai (53,85%) merupakan responden perempuan, sedangkan sisanya sebanyak 12 pegawai (46,15%) merupakan responden laki-laki.

Kemudian, diketahui bahwa separuh dari seluruh responden atau sebanyak 13 pegawai (50,00%) memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1) dan frekuensi terendah atau sebanyak 2 pegawai (7,69%) memiliki pendidikan terakhir SMA, sedangkan sisanya 7 pegawai (26,92%) memiliki pendidikan terakhir D3, kemudian responden dengan pendidikan terakhir Magister (S2) berjumlah 4 pegawai (15,39%).

Selanjutnya, diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 12 pegawai (46,15%) berusia antara 31-40 tahun sedangkan pada urutan usia terbanyak kedua yaitu pada rentang usia 41-45 tahun berjumlah 7 pegawai (26,92%), selanjutnya kedua rentang usia responden yaitu 26-30 tahun dan 46-55 tahun sama-sama berjumlah 3 pegawai (11,54%), kemudian responden pada usia 21-25 tahun hanya terdapat 1 pegawai (3,85%), dan tidak ada pegawai (0%) yang memiliki usia lebih dari 56 tahun.

Selain itu, diketahui bahwa mayoritas pegawai bekerja pada kedua sub kerja/bagian/divisi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Anggaran yang sama-sama berjumlah 8 pegawai (30,77%). Kemudian sisanya 6 pegawai (23,07%) bekerja pada sub kerja/bagian/divisi Sekretariat dan sub kerja/bagian/divisi yang paling sedikit adalah Pemanfaatan dan Penghapusan Aset yang berjumlah 4 pegawai (15,39%).

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X_1)

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai 2 indikator. Pada indikator Pengetahuan Yang Berkaitan Dengan Pekerjaan diperoleh persentase skor jawaban sebesar 60,00%. Apabila mengacu pada pedoman kategorisasi, persentase tersebut termasuk dalam kategori “Cukup” karena berada pada rentang antara 52,01% - 68,00%.

Pada indikator Kemampuan diperoleh persentase skor jawaban sebesar 60,77%. Apabila mengacu pada pedoman kategorisasi, persentase tersebut termasuk dalam kategori “Cukup” karena berada pada rentang antara 52,01% - 68,00%.

Sehingga, hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar 60,38% berada diantara interval 52,01% - 68%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berada dalam kategori “Cukup”. Namun masih terdapat *gap* sebesar 39,62%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2)

Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai 6 indikator. Pada indikator Nilai Integritas Dan Etika diperoleh persentase skor jawaban sebesar 66,77%. Apabila mengacu pada pedoman kategorisasi, persentase tersebut termasuk dalam kategori “Cukup” karena berada pada rentang antara 52,01% - 68,00%.

Pada indikator Komitmen Terhadap Kompetensi, Analisis Risiko dan *Review* Atas Kinerja diperoleh persentase skor jawaban masing-masing sebesar 78,46%. Apabila mengacu pada pedoman kategorisasi, persentase tersebut termasuk dalam kategori “Baik” karena berada pada rentang antara 68,01% - 84,00%.

Pada indikator Pembinaan Sumber Daya Manusia diperoleh persentase skor jawaban sebesar 59,23%. Apabila mengacu pada pedoman kategorisasi, persentase tersebut termasuk dalam kategori “Cukup” karena berada pada rentang antara 52,01% - 68,00%.

Pada indikator Akuntabilitas Sumber Daya Manusia diperoleh persentase skor jawaban sebesar 72,05%. Apabila mengacu pada pedoman kategorisasi, persentase tersebut termasuk dalam kategori “Baik” karena berada pada rentang antara 68,01% - 84,00%.

Sehingga, hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 70,38% berada diantara interval 68,01% - 84,00%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada dalam kategori “Baik”. Namun masih terdapat *gap* sebesar 29,62%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y)

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mempunyai 6 indikator. Pada indikator Memiliki Manfaat Prediktif dan Tepat Waktu diperoleh persentase skor jawaban masing-masing sebesar 61,54%. Apabila mengacu pada pedoman kategorisasi, persentase tersebut termasuk dalam kategori "Cukup" karena berada pada rentang antara 52,01% - 68,00%.

Pada indikator Lengkap, Penyajian Jujur dan Netralitas diperoleh persentase skor jawaban masing-masing sebesar 78,46%. Apabila mengacu pada pedoman kategorisasi, persentase tersebut termasuk dalam kategori "Baik" karena berada pada rentang antara 68,01% - 84,00%.

Pada indikator Dapat Diverifikasi diperoleh persentase skor jawaban sebesar 60,38%. Apabila mengacu pada pedoman kategorisasi, persentase tersebut termasuk dalam kategori "Cukup" karena berada pada rentang antara 52,01% - 68,00%.

Sehingga, hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebesar 67,60% berada diantara interval 52,01% - 68,00%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berada dalam kategori "Cukup". Namun masih terdapat *gap* sebesar 32,40%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4.1.3 Hasil Analisi Verifikatif

Pada penelitian ini, terdapat 14 variabel manifes dan 3 variabel laten yakni Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X_1) yang diukur dengan 2 variabel manifes, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2) dengan 6 variabel manifes dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y) dengan 6 variabel manifes.

4.1.3.1 Model Pengukuran Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk 2 variabel manifes yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *loading* untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Nilai *Composite Reliability* untuk variabel laten Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar 0,900**.** Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk variabel laten Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar 0,900 dalam skala 0 – 1. Nilai *Average Variance Extracted* sebesar 0,818 menunjukkan bahwa 81,8% informasi yang terdapat pada variabel manifes (kedua indikator) dapat tercermin melalui variabel laten Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Diantara indikator, X1.1 paling kuat dalam merefleksikan variabel laten Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), disusul kemudian X1.2.

4.1.3.2 Model Pengukuran Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk 6 variabel manifes yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *loading* untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Nilai *Composite Reliability* untuk variabel laten Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 0,885. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk variabel laten Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 0,885 dalam skala 0 – 1. Nilai *Average Variance Extracted* sebesar 0,563 menunjukkan bahwa 56.3% informasi yang terdapat pada variabel manifes (keenam indikator) dapat tercermin melalui variabel laten Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Diantara indikator, X2.1 paling kuat dalam merefleksikan variabel laten Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), disusul kemudian X2.2, X2.3, X2.4, X2.5 dan X2.6.

4.1.3.3 Model Pengukuran Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk 6 variabel manifes yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *loading* untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Nilai *Composite Reliability* untuk variabel laten Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebesar 0,918. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk variabel laten Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebesar 0,918 dalam skala 0 – 1. Nilai *Average Variance Extracted* sebesar 0,652 menunjukkan bahwa 65,2% informasi yang terdapat pada variabel manifes (keenam indikator) dapat tercermin melalui variabel laten Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Diantara indikator, Y1 dan Y2 paling kuat dalam merefleksikan variabel laten Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), disusul kemudian Y5, Y3, Y4 dan Y6.

4.1.3.4 Model Struktural

Model struktural adalah model yang menghubungkan variabel laten *Exogenous* dengan variabel laten *Endogenous* atau hubungan variabel *Endogenous* dengan variabel *Endogenous* lainnya. Berikut rangkuman nilai-nilai yang digunakan dalam model struktural.

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengaruh sebesar 17,8% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pengaruh sebesar 29,5% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan demikian X_1 dan X_2 mempunyai pengaruh sebesar 47,3% terhadap Y, sedangkan sisanya sebesar 52,7% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.4 Uji Validasi

4.1.4.1 Uji Validasi Instrumen

Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya ≥ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi *pearson product momment*.

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengujian validitas instrumen terlihat bahwa seluruh pernyataan yang diajukan untuk masing-masing variabel yang terdiri dari Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki nilai koefisien validitas di atas 0,3 yang menunjukkan bahwa seluruh pernyataan tersebut sudah melakukan fungsi ukurnya (mampu mengukur tiap indikator).

Sehingga mampu mencapai tujuan pengukuran (menghasilkan data) untuk setiap variabel laten dalam penelitian ini. Selain itu, menunjukkan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui kuesioner. Dengan demikian, kuesioner dengan pernyataan masing-masing dapat dijadikan alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4.1.4.2 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

4.1.4.3 *Convergent Validity*

Uji *convergent validity* dengan program *Partial Least Square (PLS)* dapat dilihat dari *Loading Factor* untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* nilai *loading factor* harus lebih dari 0,7 serta nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan nilai *Communality* harus lebih besar dari 0,5. Berikut disajikan hasil pengujian dengan menggunakan *SmartPLS 2.0*.

Tebel 1
Outer Loadings

	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X_1)	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y)
$X_{1.1}$	0,911	0,454	0,506
$X_{1.2}$	0,898	0,362	0,474
$X_{2.1}$	0,758	0,797	0,537
$X_{2.2}$	0,023	0,746	0,186
$X_{2.3}$	0,023	0,746	0,186
$X_{2.4}$	0,023	0,746	0,186
$X_{2.5}$	0,368	0,737	0,672
$X_{2.6}$	0,248	0,729	0,428
$Y_{.1}$	0,334	0,588	0,864
$Y_{.2}$	0,334	0,588	0,864
$Y_{.3}$	0,322	0,347	0,751
$Y_{.4}$	0,322	0,347	0,751
$Y_{.5}$	0,774	0,636	0,854
$Y_{.6}$	0,322	0,347	0,751

Berdasarkan tabel di atas, nilai loading dari semua variabel laten terhadap indikator menunjukkan nilai > 0,7 (Imam Ghozali, 2006) dan nilai $t_{statistic}$ seluruhnya lebih besar dari 1,96 sehingga semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya.

Tebel 2
Hasil Uji AVE

Variabel Laten	AVE
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X_1)	0,818
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2)	0,563
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y)	0,652

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai AVE untuk ketiga variabel seluruhnya lebih besar dari 0,5 sehingga seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi persyaratan *Convergent Validity.*

4.1.4.4 *Discriminant Validity*

Berikut disajikan hasil pengujian dengan menggunakan *SmartPLS 2.0*.

Tabel 3
Cross Loading Factor

	X1	X2	Y
X1.1	0,953162	0,670903	0,879363
X1.2	0,912116	0,400994	0,653942
X1.3	0,914654	0,477322	0,645887
X2.1	0,576905	0,908747	0,682199
X2.2	0,402090	0,832154	0,513416
Y1	0,746576	0,599191	0,766188
Y2	0,635981	0,595125	0,878019
Y3	0,561609	0,508032	0,823990

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai korelasi *(loading factor)* setiap indikator dengan variabel latennya memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap variabel laten lain sehingga variabel laten memiliki *discriminant* yang memenuhi syarat.

Tabel 4
Hasil Uji Perbandingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel Laten	Akar AVE
X_1	0,905
X_2	0,751
Y	0,807

	Korelasi Antar Variabel Laten		
	X_1	X_2	Y
X_1	1,000		
X_2	0,453	1,000	
Y	0,542	0,622	1,000

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai akar AVE untuk setiap kontstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model sehingga variabel laten dinyatakan memiliki *discriminant* yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, ukuran *cross loadings* maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latennya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel reflektif telah terpenuhi.

4.1.5 Uji Reliabilitas Instrumen

Dalam *Partial Least Square (PLS)* untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan uji *Composite Reliability* adapun *Rule of Thumb* yang digunakan nilai reliabilitas harus lebih besar dari 0,7. Berikut disajikan hasil pengujian dengan menggunakan *SmartPLS 2.0*.

Tabel 5
Hasil Uji *Composite Reliability*

	Composite Reliability
X_1	0,948112
X_2	0,862859
Y	0,863491

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai *Composite Reliability* yang diperoleh untuk ketiga variabel laten sudah lebih besar dari nilai *Rule of Thumb* yang direkomendasikan yaitu 0,7. Hal ini berarti seluruh indikator dari ketiga variabel laten terbukti memiliki konsistensi dan akurasi instrumen dalam mengukur konstruk secara baik.

4.1.5.1 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Berdasarkan tabel di bawah, diperoleh nilai koefisien jalur struktural X_1 terhadap Y sebesar 0,328 lebih kecil dari pada koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,474.

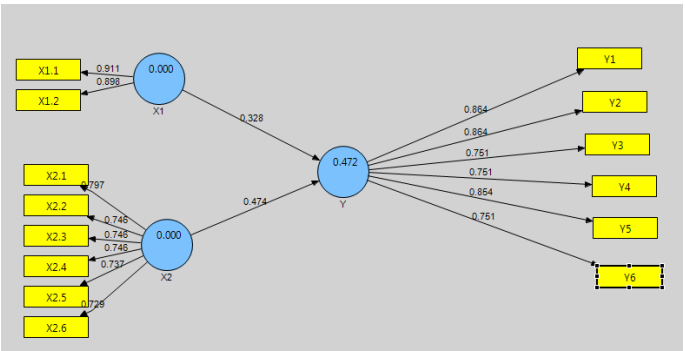
Tabel 6
Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis
(*Path Coefficients*)

	***Original Sample* (O)**	**T *Statistics* (|O/STERR|)**
$(X_1) \rightarrow Y$	0,328	4,246
$(X_2) \rightarrow (Y)$	0,474	7,433

Nilai R-*Square* menunjukkan besarnya pengaruh yang terjadi antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Nilai R-*Square* (koefisien determinasi) dari Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah sebesar 47,3% sedangkan sisanya sebesar 52,7% merupakan pengaruh dari variabel lain diluar penelitian.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian selanjutnya dilakukan uji signifikansi pengaruh parsial variabel eksogen terhadap variabel endogen sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh *output* sebagai berikut:



Gambar 1
Nilai $t_{statistik}$

1. **Pengaruh X_1 Terhadap Y (Hipotesis 1)**

   Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) diduga akan memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk itu, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

   Ho.$\gamma_1 = 0$: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

   Ha.$\gamma_1 \neq 0$: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

   Untuk menguji hipotesis di atas, digunakan nilai $t_{statistik}$ yang telah disajikan $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 terhadap Y diperoleh sebesar 4,246. Nilai tersebut lebih besar dari 1,96 (Uce Indahyanti, 2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan kontribusi pengaruh sebesar 17,8%.

2. **Pengaruh X_2 Terhadap Y (Hipotesis 2)**

   Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diduga akan memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk itu,

dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.$\gamma_2 = 0$: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Ha.$\gamma_2 \neq 0$: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Untuk menguji hipotesis di atas, digunakan nilai $t_{statistik}$ yang telah disajikan $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 terhadap Y diperoleh sebesar 7,433. Nilai tersebut lebih besar dari 1,96 (Uce Indahyanti, 2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan kontribusi pengaruh sebesar 29,5%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X_1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y)

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{statistik}$ sebesar 4,246 lebih besar dari t_{kritis} (1,717) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memberikan kontribusi 17,08% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan bahwa ketika Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) semakin baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga akan semakin meningkat.

Dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan melalui tanggapan responden atas kuesioner yang telah disebar menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) – Pemerintah Kota Cimahi yaitu masih terbatasnya pegawai berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi sehingga menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Hal tersebut tercermin melalui indikator Pengetahuan Yang Berkaitan Dengan Pekerjaan dengan persentase 60,00% dapat diinterpretasikan dalam kategori “Cukup” dan masih terdapat *gap* sebesar 40,00%.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Abdul Hafiz Tanjung (2014:6) menjelaskan bahwa salah satu hal mendasar LKPD tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI dikarenakan langkanya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2.2 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X_2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y)

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{statistik}$ sebesar 7,433 lebih besar dari t_{kritis} (1,717) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan kontribusi 29,05% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan bahwa ketika Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semakin baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga akan semakin meningkat.

Dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan melalui tanggapan responden atas kuesioner yang telah disebar menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) – Pemerintah Kota Cimahi yaitu pengendalian internal yang ada belum signifikan efektif, masih terlihat longgar pengawasan yang ketat. Ketika laporan keuangan disusun, kurangnya tindak lanjut untuk peninjauan ulang.

Hal tersebut tercermin melalui indikator Pembinaan Sumber Daya Manusia dengan persentase 59,23% dapat diinterpretasikan dalam kategori “Cukup” dan masih terdapat *gap* sebesar 40,77%.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Mahmudi (2016:251) menyatakan instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadi buruk salah satu penyebab utamanya berasal dari lemahnya sistem pengendalian internal.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) – Pemerintah Kota Cimahi dan termasuk dalam kategori berpengaruh cukup/sedang, artinya semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), maka hal tersebut akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) - Pemerintah Kota Cimahi dan termasuk dalam kategori berpengaruh cukup/sedang, artinya semakin baik diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maka tentu akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

5.2. Saran

5.2.1 Saran Operasional

1. Guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perlu dilakukan upaya-upaya yang efektif, yaitu dengan diselenggarakannya program pendidikan atau pelatihan sumber daya manusia secara intensif/berkala guna menambah pengetahuan dan mengasah keterampilannya dalam rangka pengembangan diri sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.
2. Dalam rangka membangun sistem pengendalian intern yang ketat dan efektif diperlukan peningkatan sikap aparatur yang patuh dan disiplin pada peraturan perundang-undangan dan menerapkan kode etik profesi guna mengontrol/menjaga sumber daya manusia agar terhindar dari perbuatan menyimpang menuju ranah yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan sumber daya keuangan dan terintervensi negatif oleh pihak lain sehingga merubah pencatatan/penyusunan laporan keuangan yang tidak *real*.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu Akuntansi Sektor Publik serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Disarankan kepada peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian dengan topik yang sama, agar mencantumkan indikator yang berbeda dari indikator yang sudah digunakan dalam penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu dengan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) menggunakan *Partial Least Square* (PLS), akan tetapi hendaklah dengan unit analisis, populasi dan

sampel yang berbeda guna memperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun peneliti-peneliti terdahulu.

VI. Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung. 2014. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Alfabeta

Adeh Ratna Komala. 2012. *The Influence Of The Accounting Managers' Knowledge and The Top Managements' Support On The Accounting Information System and Its Impact On The Quality Of Accounting Information: A Case Of Zakat Institutions In Bandung*. Jurnal. Bandung

Andi Supangat. 2010. *Statistika Dalam Kajian Deskriftif, Inferensi dan Nonparametrik*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Anwar Prabu Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan 10. Bandung: Rosda

Azhar Susanto. 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi Perdana. Bandung: Lingga Jaya

Dadang Suwanda. 2013. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: PPM Manajemen

Dewi Andini, dkk. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan*. Jurnal. Pekanbaru. Melalui: <http://www.jurnalkiatuir.com/jurnal/index.php/jurnal-ekonomi/article/view/62/58>

Eddy Soeryanto S. 2014. *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung*. Edisi Revisi. Bandung: Elex Media Komputindo

Ely Suhayati, dkk. 2009. *Auditing (Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik)*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: Brama Ardian

Hasanah dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: In Media

Hutapea dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ida Ayu Enny Kiranayanti, dkk. 2016. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal. Badung. Melalui: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/18075>

Iftitah Dian Humairoh. 2013. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Jember)*. Artikel Ilmiah. Jember. Melalui:

<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/63134/Iftitah%20Dian%20Humairoh.pdf;sequence=1>

Iman Mulyana. 2010. *Manajemen dan Kehidupan Manusia*. Ebook. Melalui: <http://books.google.co.id/books?id=Wcy1sDN0gZ0C&pg=PA96&dq=kualitas+adalah&hl=id&ei=jSVGTujhNYXVrQeM9KTTAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCwQ6AEwAQ#v=onepage&q=kualitas&f=false>

Indra Bastian. 2007. *Pelaksanaan Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Jonny M Situmorang. 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. Bandung. Melalui: <http://repository.unpas.ac.id/view/creators/Jonny_M_Situmorang=3A094020150=3A=3A.html>

Kadek Desiana Wati, dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal. Singaraja. Melalui: http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2972

Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Ma'ruf Abdullah. 2014. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Muh. Akob Kadir. 2016. *SDM dan Daya Saing Dalam Bingkai Kearifan Lokal*. Cetakan I. Makasar: Alauddin University Press. Melalui: http://stiem-bongaya.ac.id/publikasi-4-sdm-dan-saing-dalam-bingkai-kearifan-lokal.html

Ni Made Rika Krisna Dewi. 2014. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 10 Skpd Berupa Dinas Di Kabupaten Jembrana)*. Jurnal. Singaraja. Melalui: <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2883>

Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, dkk. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)*. Jurnal. Singaraja. Melalui: <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2978>

Safrida Yuliani, dkk. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*. Jurnal. Banda Aceh. Melalui: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/340>

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Melalui: <http://algol.mdl2.com/pluginfile.php/103/mod_resource/content/1/Pengujian%20Model%20Riset.pdf>

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Situs Media *Online*:

BPK RI. 2011. *Cimahi Kembali Peroleh Predikat WDP dari BPK*. Melalui: <http://www.bpk.go.id/news/cimahi-kembali-peroleh-predikat-wdp-dari-bpk> Diakses: 15/3/2017

Dedy Afrianto. 2016. *40% Laporan Keuangan Pemerintah Gagal Peroleh Opini WTP*. Melalui: <http://economy.okezone.com/read/2016/10/04/320/1505801/40-laporan-keuangan-pemerintah-gagal-peroleh-opini-wtp> Diakses: 23/3/2017

M. Fajar Marta. 2016. *Pemerintah Disarankan Bentuk Satgas Pengendalian Internal Laporan Keuangan*. Melalui: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/06/214932126/pemerintah.disarankan.bentuk.satgas.pengendalian.internal.laporan.keuangan> Diakses: 23/3/2017

Luqman Hakim. 2014. *BPK Sebut Kualitas Laporan Keuangan Daerah Masih Rendah*. Melalui: <http://www.antaranews.com/berita/468227/bpk-sebut-kualitas-laporan-keuangan-daerah-masih-rendah> Diakses: 15/3/2017

Ruzuar-Humas Jabar. 2015. *Sosialisasi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Bappeda Jawa Barat*. Melalui: <http://www.bpkp.go.id/jabar/berita/read/14096/5/Sosialisasi-Penerapan-Sistem-Akuntansi-Pemerintah-Berbasis-Akrual-di-Bappeda-Jawa-Barat.bpkp> Diakses: 15/3/2017